

DINAMIKA KETENAGAKERJAAN DAN KESEMPATAN BERUSAHA DI PEDESAAN

Sudi Mardianto dan Nizwar Syafa'at¹⁾

ABSTRACT

The objective of this paper is to depict dynamic of labor opportunity in rural area. This paper describes : (a) structural change of rural labor opportunity, (b) linkages between productivity and rural labor opportunity, and (c) rural labor opportunity perspective. The reviewed materials are mainly from the *Patanas* research conducted in several years. The result in this paper shows that the agricultural sector have enough capacity to create labor opportunity in rural area if its development is prioritized.

Key word : *labor opportunity, productivity, interlinkages, rural areas.*

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai dinamika ketenagakerjaan dan kesempatan berusaha di pedesaan, yang meliputi perubahan struktur kesempatan kerja di pedesaan, keterkaitan antara perkembangan produktivitas dengan kesempatan kerja di pedesaan dan perspektif ketenagakerjaan dan kesempatan berusaha di pedesaan. Bahan utama tulisan ini merupakan hasil penelitian *Patanas*. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa sektor pertanian mempunyai kapasitas yang memadai untuk menciptakan kesempatan kerja di pedesaan asalkan pembangunan sektor pertanian mendapatkan prioritas utama dalam pembangunan ekonomi.

Kata kunci : *kesempatan kerja, produktivitas, keterkaitan, wilayah pedesaan.*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama PJP I telah membawa perubahan struktur perekonomian nasional di mana peranan sektor pertanian dalam perekonomian nasional digantikan oleh sektor industri. Kalau pada awal PJP I pangsa GDP sektor pertanian terhadap GDP nasional sebesar 34 persen, maka pada akhir PJP I hanya tinggal 19 persen. Transformasi struktur ekonomi nasional tersebut ternyata tidak diikuti oleh transformasi tenaga kerja secara proporsional. Selama PJP I, penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian hanya mengalami penurunan dari 64 menjadi 51 persen (Simatupang dan Mardianto, 1996). Ketidakseimbangan transformasi ekonomi dan penyerapan tenaga kerja tersebut mencerminkan adanya ketimpangan pembangunan yang dilaksanakan selama PJP I antara sektor pertanian dan industri di mana transformasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri tidak berjalan lancar. Salah satu dampak dari ketimpangan transformasi tersebut adalah

kesenjangan antara produktivitas sektor pertanian dengan sektor industri yang menurut data BPS seperti yang ditulis Rasahan (1996) kesenjangan tersebut cenderung makin melebar.

Lambannya transformasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri disebabkan oleh banyak faktor di mana salah satunya berkaitan dengan ketenagakerjaan dan kesempatan kerja di sektor pertanian. Untuk mengetahui secara lebih jelas mengenai masalah tersebut, maka diperlukan gambaran mengenai dinamika ketenagakerjaan dan kesempatan berusaha di pedesaan. Gambaran mengenai dinamika tersebut dirangkum secara lengkap dalam tulisan ini, dengan pokok bahasan meliputi :

- (a) Perubahan struktur kesempatan kerja di tingkat rumah tangga.
- (b) Keterkaitan antara produktivitas sektor pertanian dan perkembangan industri di wilayah pedesaan dengan kesempatan kerja di pedesaan.
- (c) Perspektif ketenagakerjaan dan kesempatan kerja di pedesaan.

1) Staf Peneliti pada Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.

Pembahasan tulisan ini difokuskan pada dinamikanya baik antar waktu maupun antar wilayah (Jawa vs Luar Jawa). Pendekatan tulisan ini bersifat deskriptif yang melihat kecenderungan perubahan dinamikanya. Sebagain besar sumber tulisan ini berasal dari penelitian Patanas dan didukung hasil-hasil penelitian lainnya.

PERUBAHAN STRUKTUR KETENAGAKERJAAN : GAMBARAN MAKRO

Walaupun kontribusi sektor pertanian cenderung menurun namun sektor pertanian tetap mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional negara berkembang. Peran tersebut diwujudkan dalam bentuk (a) sumbangan produk; (b) sumbangan pasar, dan (c) sumbangan faktor produksi. Satu sumbangan lain yang tidak kalah pentingnya adalah sumbangan devisa. Sumbangan faktor produksi dapat diidentifikasi lebih lanjut dalam bentuk : (a) penawaran tenaga kerja bagi sektor nonpertanian (selanjutnya disebut sektor industri), dan (b) pembentukan modal bagi investasi, baik melalui sistem perpajakan maupun pembentukan tabungan masyarakat (Kuznets, 1961 dalam Suryana, 1989).

Peran lain dari sektor pertanian yang juga tidak kalah pentingnya adalah menyediakan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang terus bertambah. Peran ini akan lebih menonjol lagi seandainya penciptaan lapangan kerja dan penyerapan angkatan kerja di sektor industri tidak lebih cepat dari pertumbuhan angkatan kerja. Hal ini dapat terjadi seandainya industri yang dikembangkan hanyalah yang berorientasi pada jenis teknologi padat modal atau terjadi stagnasi dalam sektor tersebut.

Proporsi angkatan kerja di Indonesia terus berkembang. Pada tahun 1976, proporsi angkatan kerja di Indonesia sebesar 37,99 persen dari total penduduk, dan pada tahun-tahun berikutnya selalu meningkat sehingga pada tahun 1993 mencapai 43,06 persen. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh relatif cepatnya laju pertumbuhan penduduk usia kerja. Peningkatan proporsi angkatan kerja ternyata diikuti oleh meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yaitu dari 54,9 persen pada tahun 1976 menjadi 56,6 persen pada tahun 1993. Peningkatan TPAK di Indonesia dipengaruhi oleh berubahnya struktur penduduk usia kerja menurut kelompok umur dan meningkatnya TPAK pada berbagai kelompok umur penduduk 15 tahun ke atas (Anwar, 1992). Berdasarkan

data TPAK tersebut dapat dikatakan bahwa beban ketergantungan di Indonesia masih cukup besar. Fenomena ini jelas akan mempengaruhi kesejahteraan yang diterima oleh tenaga kerja di Indonesia.

Pertumbuhan angkatan kerja yang relatif cepat tersebut ternyata diikuti oleh meningkatnya pengangguran terbuka, dari 2,18 persen pada tahun 1980 menjadi 2,83 persen pada tahun 1993. Menurut Anwar (1992), tingkat pengangguran terbuka untuk perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Kalau dilihat dari tingkat pendidikan, tingkat pengangguran terbuka lebih banyak terjadi pada penduduk dengan tingkat pendidikan SLTA. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat ini tingkat pengangguran terjadi pada angkatan kerja dengan pendidikan yang relatif tinggi. Pada umumnya yang dianggap sebagai penyebab tingginya tingkat pengangguran adalah ketidakmampuan sektor industri menyediakan kesempatan kerja yang memadai.

Perubahan struktur kesempatan kerja yang terjadi di Indonesia menunjukkan adanya ketimpangan antara sektor pertanian dan sektor nonpertanian. Hal ini ditunjukkan dengan tidak sejalanannya perubahan PDB dengan perubahan dalam penyerapan tenaga kerja. Jika A mewakili sektor pertanian; I mewakili sektor industri yang terdiri dari sektor manufaktur, pertambangan dan galian, listrik, air dan gas serta bangunan; dan S mewakili sektor jasa yang terdiri dari sektor perdagangan, perbankan dan jasa; maka pola perubahan struktur klasik PDB atau penyerapan tenaga kerja adalah (A-I-S) \longrightarrow (I-A-S) \longrightarrow (I-S-A) \longrightarrow (S-I-A) (ESCAP, 1982).

Berdasarkan acuan tersebut di atas, perubahan struktur perekonomian Indonesia dari tahun 1971-1993, menunjukkan pola (S-A-I) \longrightarrow (I-S-A) \longrightarrow (S-I-A). Apabila pola perubahan struktur ekonomi negara-negara maju di Eropa dipakai sebagai acuan maka dapat dikatakan bahwa pola perubahan struktur PDB Indonesia merupakan pola pintas. Dikatakan demikian karena struktur PDB Indonesia tidak pernah melalui struktur tradisional (I-A-S). Hal ini terjadi karena memang sejak awal sektor jasa sudah jauh lebih besar daripada sektor industri. Namun pesatnya perkembangan sektor jasa ini, terutama didominasi oleh usaha-usaha informal dalam rangka menghidupi keluarga (*survival*) (Simatupang dan Mardianto, 1996).

Pernyataan di atas memang banyak benarnya, apabila kita kembali ke belakang (pertengahan dasawarsa 60-an) kondisi ekonomi Indonesia memang sangat buruk seperti inflasi yang sangat tinggi, minimnya pasokan pangan sehingga Indonesia pernah

menjadi pengimpor beras terbesar di dunia, kondisi sosial politik yang belum stabil dan tingkat pengangguran yang tinggi. Sektor industri yang diharapkan dapat sedikit membantu mengatasi masalah pengangguran justru dihadapkan pada masalah pengangguran kapasitas yang serius (Booth dan Mc.Cawley, 1982; Booth, 1994).

Melihat kondisi seperti ini dapat dimaklumi kalau sektor informal menjadi pilihan utama untuk menghidupi keluarga. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila kita lihat komposisi PDB tahun 1961 (BPS, harga konstan 1960) sektor jasa sudah mempunyai pangsa terbesar kedua (33,0%) setelah pertanian (51,8%) sedangkan sektor industri hanya mempunyai pangsa sekitar 15,2 persen.

"Keterpaksaan" bekerja di sektor informal inilah yang mungkin menyebabkan munculnya pola S-I-A pada tahun 1981 yang mungkin sekali terlalu dini. Pernyataan ini didukung oleh bukti yang cukup kuat yaitu peningkatan pangsa PDB sektor jasa tersebut, malah menimbulkan penurunan indeks produktivitas tenaga kerjanya. Di samping itu, indeks produktivitas tenaga kerja sektor jasa juga lebih rendah daripada sektor industri yang masing-masing pada tahun 1993 adalah 1,1902 dan 2,6943. Kedua hal itu tidaklah konsisten dengan perkembangan sektor jasa modern (Simatupang dan Mardianto, 1996).

Menurut hipotesa Fisher-Clark dengan melihat kecenderungan yang dialami oleh negara maju, suatu negara akan mengalami perkembangan sektor jasa modern apabila peranan sektor pertanian relatif menurun terhadap perindustrian baik dalam pangsa PDB maupun tenaga kerja. Kemudian ketika mereka menjadi matang di dalam apa yang disebut oleh Rostow ekonomi "konsumsi massa tinggi", pangsa sektor jasa baik dalam pekerjaan maupun PDRB akan relatif tumbuh terhadap perindustrian (Alexander dan Booth, 1994).

Lebih lanjut Simatupang dan Mardianto (1996) menyatakan, hal lain yang perlu dicatat ialah proses transformasi struktur PDRB tersebut tampaknya tidak berjalan sepadan antar sektor atau dengan perkataan lain "transformasi cenderung sebagai proses pemerasan sektor pertanian". Dikatakan demikian karena penurunan pangsa PDB sektor pertanian praktis hanya diserap untuk peningkatan pangsa salah satu sektor lainnya. Pada periode tahun 1970-1980 penurunan pangsa sektor pertanian praktis hanya diserap untuk peningkatan pangsa sektor industri, sedangkan pada dekade 1980-an penurunan pangsa PDRB sektor

pertanian tersebut praktis hanya diserap untuk peningkatan pangsa PDRB sektor jasa.

Namun perlu diingat bahwa penurunan pangsa PDB suatu sektor bukan berarti sektor tersebut tidak mengalami pertumbuhan, seperti yang dikatakan Sjahrir (1992) bahwa penurunan *share* PDB sektor pertanian bukan karena sektor ini menurun pertumbuhannya. Selama 24 tahun terakhir, pertumbuhan sektor pertanian Indonesia selalu lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk di sektor tersebut. Terjadinya penurunan pangsa sektor pertanian disebabkan karena sektor-sektor lain (jasa dan industri) yang secara nasional tumbuh lebih cepat dari sektor pertanian.

Pola penyerapan tenaga kerja sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 1993 mempunyai pola yang tetap yaitu pola A-S-I (Simatupang dan Mardianto, 1996). Namun demikian, pangsa penyerapan tenaga kerja sektor pertanian menunjukkan kecenderungan yang menurun yaitu dari 64,2 persen pada tahun 1971 menjadi 50,6 persen pada tahun 1993, walaupun secara absolut tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian selalu meningkat. Kondisi yang berbeda terjadi pada sektor industri dan jasa yang pangsa penyerapan tenaga kerjanya menunjukkan kecenderungan meningkat walaupun relatif lambat. Pangsa penyerapan tenaga kerja sektor industri meningkat dari 8,4 persen pada tahun 1971 menjadi 15,7 persen pada tahun 1993, sedangkan pangsa sektor industri meningkat dari 27,4 persen pada tahun 1971 menjadi 35,7 persen pada tahun 1993. Peningkatan penyerapan tenaga kerja yang relatif kecil pada sektor industri disebabkan karena pemerintah banyak mengembangkan industri dengan teknologi modern yang padat modal dan hemat tenaga kerja (ESCAP, 1982). Untuk sektor jasa peningkatan penyerapan tenaga kerja terutama didominasi oleh sektor informal.

Senjangnya perubahan struktur perekonomian Indonesia, secara khusus adalah akibat dari rendahnya daya serap tenaga kerja sektor industri, namun yang paling pesat pertumbuhannya, sehingga sangat memberatkan sektor pertanian. **Pertama**, karena sifatnya yang sangat akomodatif terhadap penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian terpaksa menampung tenaga kerja melebihi kapasitasnya, sehingga menanggung beban pengangguran terselubung (*disguished unemployment*) yang sangat tinggi. Simatupang dkk. (1996) menunjukkan bahwa pengangguran terselubung di sektor pertanian selama periode tahun 1976-1993 tetap sekitar 24-28 persen.

Tingginya tingkat pengangguran terselubung ini tentu merupakan suatu pemborosan sumber daya manusia. Oleh karena itu, dapat dikatakan senjangnya perubahan struktur perekonomian telah turut menimbulkan inefisiensi perekonomian Indonesia.

Kedua, perubahan struktur PDB yang tidak seiring dan tidak sepadan dengan perubahan struktur penyerapan tenaga kerja telah menimbulkan kesenjangan pendapatan sektoral yang sangat lebar. Secara lebih spesifik, penurunan pangsa PDB sektor pertanian yang jauh lebih cepat dari penurunan pangsa penyerapan tenaga kerja telah menimbulkan tingkat pendapatan per kapita di sektor pertanian jauh lebih rendah dibandingkan dengan di sektor-sektor lainnya. Hal ini dapat dilihat dari indeks produktivitas tenaga kerja sektor pertanian yang jauh lebih rendah daripada sektor lainnya, khususnya jika dibandingkan dengan sektor industri. Lebih ironis lagi, indeks produktivitas tenaga kerja tersebut cenderung menurun yang berarti bahwa kesenjangan pendapatan sektoral tersebut semakin buruk (Simatupang dan Mardianto, 1996). **Ketiga**, tingkat pengangguran yang tinggi dan rendahnya produktivitas tenaga kerja merupakan penyebab utama tingginya proporsi penduduk yang miskin di sektor pertanian dan di pedesaan umumnya. Berdasarkan data yang dilaporkan BPS, 61 persen atau 27,2 juta orang penduduk miskin pada tahun 1990 bekerja di sektor pertanian.

Tingkat pengangguran terselubung di sektor pertanian selama periode tahun 1976 - 1993 berkisar antara 24 - 29 persen, sedangkan sektor industri berkisar hanya antara 2 - 3,5 persen, dan sektor jasa berkisar antara 5 - 9 persen. Tingkat pengangguran terselubung di Indonesia, secara total jauh lebih besar dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 33 - 41 persen. Fenomena ini menunjukkan bahwa tenaga kerja di Indonesia bekerja di bawah kapasitas kerjanya. Biro Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan tenaga kerja penuh (*full employment*) adalah orang yang bekerja selama 35 jam dalam seminggu. Berdasarkan acuan tersebut, pada periode tahun 1976 - 1993, jumlah orang yang bekerja setara dengan 35 jam berkisar antara 70 - 90 persen dari jumlah orang yang bekerja di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa di sektor pertanian tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu relatif masih banyak. Fakta ini sesuai dengan tingkat pengangguran tidak kentara yang cukup tinggi di sektor pertanian dibandingkan dengan sektor industri dan jasa. Fenomena ini dapat terjadi karena jam kerja di sektor pertanian bersifat musiman dan di luar musim

pengolahan tanah dan panen, pekerjaannya relatif ringan (Simatupang dkk., 1996).

Pada tahun 1976, orang yang bekerja setara dengan 35 jam seminggu di sektor industri sebesar 83,31 persen dari jumlah total orang yang bekerja. Namun pada tahun-tahun berikutnya, jumlah orang yang bekerja setara dengan 35 jam seminggu terus meningkat dan pada tahun 1993 jumlahnya mencapai 120,46 persen. Tingginya jumlah orang yang bekerja setara 35 jam seminggu di sektor industri merupakan fenomena yang menarik dan hal ini dilakukan mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga bagi pekerja rendahan atau untuk mengumpulkan harta kekayaan bagi pekerja kelas atas (Simatupang dkk., 1996).

Sektor jasa juga menunjukkan keadaan yang sama dengan sektor industri di mana jumlah orang yang bekerja setara 35 jam seminggu menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat dan pada tahun 1993 mencapai 119,35 persen dari jumlah orang yang bekerja. Tingginya jumlah orang yang bekerja setara 35 jam seminggu di sektor jasa dengan melihat kenyataan bahwa sebagian besar bekerja pada sektor informal, maka fenomena ini mungkin disebabkan upaya mereka menjaga kelangsungan hidup keluarganya.

KESEMPATAN KERJA DI PEDESAAN

Perubahan Struktur Kesempatan Kerja

Gambaran di tingkat mikro yaitu rumah tangga tani hasil penelitian Patanas mengenai perubahan struktur kesempatan kerja bervariasi antar wilayah dan antar agroekosistem. Hermanto dan Purwoto (1985) serta Saptana dkk. (1996) menunjukkan bahwa di Jawa Timur proporsi kepala keluarga (KK) berdasarkan jenis pekerjaan utama selama periode 1982 - 1995 mengalami perubahan yang sangat nyata dalam konteks peranan sektor pertanian sebagai penampung tenaga kerja. Proporsi KK yang berkerja di sektor pertanian yaitu sebagai petani/nelayan mengalami penurunan dari 60,61 menjadi 39,08 persen, sedangkan KK yang berkerja di sektor nonpertanian sebagai pedagang/pengusaha dan buruh nonpertanian mengalami kenaikan masing-masing dari 4,10 dan 5,89 persen menjadi masing-masing 13,89 dan 17,19 persen (Tabel 1). Di luar Jawa perubahan tersebut tidak begitu nyata di mana peranan sektor pertanian sebagai penampung tenaga kerja tetap besar (lebih besar 50 persen) (Tabel 2). Di Sulawesi Selatan selama periode 1982-1995, proporsi KK yang berkerja di sektor pertanian hanya mengalami

penurunan sedikit dari 93,50 menjadi 91,87 persen dan yang bekerja di sektor nonpertanian juga meningkat sedikit dari 6,50 menjadi 8,13 persen.

Tabel 1. Proporsi Kepala Keluarga Menurut Jenis Pekerjaan Utama di Pedesaan Jawa Timur, 1982-1995 (%)

Jenis pekerjaan	Tahun	
	1982 ^{*)}	1995 ^{**)}
1. Petani/nelayan	60,61	39,08
2. Buruh tani/buruh neleyan	21,46	20,34
3. Buruh nonpertanian	4,10	13,89
4. Pedagang/pengusaha	5,89	17,19
5. Pegawai/pensiunan	4,44	5,81
6. Jasa lainnya	3,50	3,69
Jumlah	100,00	100,00

Keterangan : *) Hermanto dan Purwoto (1985)
**) Saptana dkk. (1996)

Tabel 2. Proporsi Kepala Keluarga Menurut Jenis Pekerjaan Utama di Desa Sawah di Luar Jawa, 1982 - 1995 (%)

Propinsi	Tahun		
	1985	1989	1996
A. Lampung^{*)}			
- Pertanian	-	90,00	80,71
- Buruh pertanian	-	0,00	5,98
- Nonpertanian	-	10,00	13,31
B. Sulawesi Selatan^{**)}			
- Pertanian	93,5	-	91,87
- Nonpertanian	6,5	-	8,13
C. Kalimantan Selatan^{***)}			
- Pertanian	-	86,84	60,00
- Buruh pertanian	-	8,53	8,00
- Buruh nonpertanian	-	4,63	32,00

Keterangan : *) Nurmanaf (1989); Sumaryanto dan Pasaribu (1996)

**) Saleh dan Hendiarto (1985); Saleh dan Zakaria (1996)

***) Santoso dan Sudaryanto (1989); Mintoro dan Suhartini (1996)

Di Lampung dan Kalimantan Selatan selama periode 1987-1995, proporsi KK yang bekerja di sektor pertanian menurun masing-masing dari 90,00 dan 86,84

persen menjadi masing-masing 80,71 dan 60,00 persen, sementara yang bekerja di sektor nonpertanian meningkat masing-masing dari 10,00 dan 4,63 persen menjadi masing-masing 13,31 dan 32,00 persen.

Dilihat dari curahan tenaga kerja rumah tangga berdasarkan agroekosistem Soentoro dkk. (1997) menunjukkan bahwa selama periode 1984-1996, peranan lahan sawah sebagai penyedia lapangan kerja di sektor pertanian digantikan oleh lahan kering. Di Jawa Timur, curahan tenaga kerja rumah tangga di lahan sawah dan lahan kering pada tahun 1984 masing-masing sebesar 66,22 dan 63,60 persen, sedangkan pada tahun 1996 berubah masing-masing menjadi 44,06 dan 51,41 persen. Makin mengecilnya peranan wilayah lahan sawah sebagai penyedia kesempatan kerja di sektor pertanian berkaitan dengan berkembangnya industri nonpertanian di wilayah tersebut yang banyak membuka kesempatan kerja terutama sebagai buruh industri.

Hal yang sama juga terjadi di Sulawesi Selatan di mana pada tahun 1984 curahan tenaga rumah tangga di lahan sawah dan lahan kering masing-masing 88,10 dan 55,55-58,60 persen, sedangkan pada tahun 1996 berubah masing-masing menjadi 92,19 dan 95,84-96,21 persen. Berbeda dengan di Jawa, perubahan curahan tenaga kerja rumah tangga di kedua wilayah di luar Jawa tersebut mengarah pada makin dominannya peranan sektor pertanian, sehingga mengecilnya peranan lahan sawah relatif terhadap lahan kering dalam menyediakan kesempatan kerja tidak dapat diinterpretasikan sebagai makin menurunnya kemampuan wilayah lahan sawah dalam menyediakan kesempatan kerja di sektor pertanian karena kemampuan tersebut masih di atas 90 persen.

Berdasarkan perubahan struktur kesempatan kerja yang telah diuraikan di atas dapat diungkap beberapa hal penting sebagai berikut :

- Di wilayah Jawa peranan sektor pertanian sebagai penyedia lapangan kerja sudah digantikan oleh sektor nonpertanian, kemampuan sektor pertanian tersebut sebagai penyedia tenaga kerja lebih kecil dari 50 persen; Sedangkan di wilayah luar Jawa peranan sektor pertanian sebagai penyedia lapangan kerja masih sangat dominan bahkan ada yang mencapai lebih dari 90 persen.
- Di wilayah Jawa, saat ini peranan lahan sawah sebagai penyedia kesempatan kerja di sektor pertanian digantikan dengan lahan kering, sedangkan di wilayah luar Jawa, peranan keduanya masih tetap dominan.

Pada tahun 1995 distribusi curahan tenaga kerja rumah tangga di sektor nonpertanian di Sulawesi Selatan lebih berdiversifikasi dibanding tahun 1984. Kalau pada tahun 1984 curahan tenaga kerja di sektor nonpertanian hanya pada beberapa kegiatan seperti usaha industri rumah tangga, buruh industri dan usaha jasa, maka pada tahun 1995 curahan tenaga kerja di sektor nonpertanian telah berkembang ke beberapa usaha yang meliputi pekerjaan bangunan, angkutan dan perdagangan. Namun demikian persentase curahan tenaga kerja rumah tangga di sektor nonpertanian tersebut mengalami penurunan dibanding tahun 1984. Distribusi curahan tenaga kerja di sektor nonpertanian di Jawa selama periode 1984-1995 tidak mengalami banyak perubahan, namun persentase curahan tenaga kerja rumah tangga di sektor nonpertanian mengalami peningkatan dibanding tahun 1984. Fakta tersebut memberikan indikasi bahwa perubahan struktur ekonomi di Jawa mengarah pada basis sektor nonpertanian, sedangkan perubahan struktur ekonomi di luar Jawa tetap berbasis pada sektor pertanian. Perubahan struktur ekonomi di Jawa yang berbasis pada sektor nonpertanian merupakan hal yang wajar mengingat Jawa mempunyai keterbatasan sumber daya lahan pertanian. Dengan demikian, maka arah perubahan struktur ekonomi yang dicerminkan oleh perubahan struktur tenaga kerja di pedesaan sudah sesuai dengan ketersediaan sumber daya. Oleh karena itu, berdasarkan temuan penelitian Patanas ini, maka perencanaan pembangunan pertanian antara Jawa dan luar Jawa masih cukup beralasan untuk dipisahkan.

Teknologi, Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja

Persoalan pokok yang dihadapi sektor pertanian adalah rendahnya kesempatan kerja dan pendapatan. Secara normatif, untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui pengembangan teknologi yang menyerap tenaga kerja.

Teknologi yang dikembangkan dalam usahatani padi adalah pemupukan berimbang, irigasi, mekanisasi dalam pengolahan tanah, penggunaan bibit unggul dan lainnya. Penggunaan teknologi tersebut akan merubah komposisi penggunaan faktor produksi antara tenaga kerja dan modal. Jika teknologi lebih banyak meningkatkan penggunaan modal, maka teknologi tersebut disebut sebagai teknologi menghemat tenaga kerja (*Labor-saving technical change*), sedangkan

sebaliknya apabila perubahan teknologi tersebut lebih banyak menggunakan tenaga kerja, maka disebut sebagai teknologi menghemat modal (*Capital-saving technical change*). Jika penggunaan suatu teknologi tidak merubah komposisi penggunaan faktor produksi, maka teknologi tersebut disebut netral (*Netral technical change*).

Namun demikian persoalan dampak perubahan teknologi tidak hanya dilihat di tingkat petani (*farm level*), tetapi harus dilihat dampaknya secara keseluruhan sepanjang alur vertikal sistem agribisnis suatu komoditas yang mengalami perubahan teknologi tersebut. Dengan demikian bisa saja dalam kurun waktu tertentu pengenalan mekanisasi akan menghemat tenaga kerja di tingkat usaha tani, tetapi penggunaan mekanisasi akan meningkatkan produksi secara regional dalam kurun waktu yang sama yang akan mendorong kegiatan industri hilirnya seperti penggilingan padi, sehingga pada periode yang sama akan tercipta kesempatan kerja yang lebih banyak dan kesempatan kerja tersebut dapat mengkompensasi tenaga kerja yang tidak digunakan di tingkat usaha tani.

Berikut ini disajikan analisis dampak irigasi terhadap produktivitas dan penyerapan tenaga kerja di tingkat usaha tani. Berdasarkan data dalam Tabel 3, terlihat bahwa produktivitas sawah beririgasi teknis lebih tinggi dibanding sawah tadah hujan, kecuali untuk Sulawesi Selatan. Sedangkan kebutuhan tenaga kerja pada lahan sawah beririgasi teknis lebih tinggi dibanding tadah hujan untuk Jawa Barat, tetapi lebih rendah untuk Lampung dan Sulawesi Selatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengembangan irigasi berdampak pada peningkatan produktivitas tetapi cenderung menghemat tenaga kerja. Namun apabila dilihat dalam kurun waktu satu tahun di mana intensitas tanam pada lahan irigasi teknis dapat meningkat menjadi 2 sampai 3 kali tanam, maka pengembangan irigasi selain mempunyai dampak pada peningkatan produksi juga berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja. Dengan kata lain pengembangan teknologi irigasi bersifat *labor intensive*.

Kualitas Tenaga Kerja Pertanian

Kualitas tenaga kerja pertanian dapat dilihat dari dua aspek yaitu tingkat pendidikan dan umur. Kedua aspek tersebut akan mempengaruhi kinerja produksi sektor pertanian. Tingkat pendidikan akan mempengaruhi produktivitas melalui kemampuan petani dalam mengadopsi teknologi, sedangkan umur

akan mempengaruhi produktivitas melalui kemampuan fisik di mana makin muda umur petani maka makin banyak kuantitas pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam suatu periode tertentu dibanding petani yang berumur tua.

Tabel 3. Tingkat Penggunaan Tenaga Kerja Manusia pada Lahan Sawah (jam kerja), 1984

Propinsi	Irigasi	Tadah hujan
	1982 ^{*)}	1995 ^{**)}
Jawa Barat ^{*)}	1438,7 (3,7)	1086,5 (3,5)
Sulawesi Selatan ^{**)}	866 (3,0)	876 (3,0)
Lampung ^{***)}	486 (4,6)	561 (3,7)

Keterangan : *) Handewi (1988)
 **) Marisa (1988)
 ***) Hendiarito (1989)

Selama dua puluh tahun terakhir kualitas tenaga kerja sektor pertanian berdasarkan tingkat pendidikannya tidak banyak mengalami perubahan. Untuk kasus Sulawesi Selatan, kalau pada tahun 1983 sebagian besar dari mereka tidak tamat SD, maka tahun 1995 sebagian besar dari mereka sudah menamatkan pendidikan dasar (Saleh, 1984; Saleh dan Zakaria, 1997). Pada tahun 1995, tingkat pendidikan petani di Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, Kalimantan Selatan juga memperlihatkan hal yang sama di mana sebagian besar dari mereka hanya tamat SD (Tabel 4). Fakta bahwa petani saat ini sebagian besar telah dapat menamatkan SD bukan hal yang luar biasa, karena memang sarana dan prasarana pendidikan dasar sudah tersebar diseluruh pelosok tanah air.

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Petani di Beberapa Pedesaan, 1995

Propinsi	Tamat (%)	
	SD	SLTP
Jawa Timur	27,65 - 41,49	4,10 - 21,15
Jawa Tengah	14,1 - 35,80	0,9 - 2,0
Lampung	22,0 - 44,0	0 - 6,0
Kalimantan Selatan	14,0 - 50,0	0 - 29,0

Sumber : Laporan Penelitian Patanas berbagai propinsi, 1996.

Apabila dilihat dari aspek umur, sebagian besar petani di Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan didominasi oleh kaum muda produktif dengan umur berkisar 25-64 tahun (Tabel 5). Hasil penelitian Patanas tersebut berbeda dengan anggapan beberapa pakar pertanian bahwa saat ini tenaga kerja sektor pertanian didominasi oleh kaum tua karena kaum mudanya melakukan migrasi ke kota tidak terbukti. Dengan demikian dilihat dari aspek umur, maka tenaga kerja sektor pertanian cukup memadai untuk melakukan pekerjaan fisik yang melelahkan di sektor pertanian.

Tabel 5. Proporsi Kepala Keluarga (petani) Berdasarkan Umur di Pedesaan, 1995

Propinsi	Tingkat umur (%)		
	< 25	25 - 64	> 64
Jawa Timur	2,19	81,28	16,53
Jawa Tengah	6,2	82,9	10,90
Kalimantan Selatan	3,7	90,6	5,7
Sulawesi Selatan	7,83	87,82	4,35

Sumber : Laporan Patanas berbagai propinsi, 1996.

Dengan kondisi teknologi yang ada sekarang, pekerjaan di sektor pertanian lebih banyak menuntut pekerjaan fisik dibanding pikiran. Dengan demikian, walaupun dilihat dari tingkat pendidikan rendah, namun dilihat dari umur, maka kualitas tenaga kerja pertanian sesungguhnya sudah sesuai dengan kebutuhan. Hasil penelitian Patanas ini menepis anggapan beberapa pakar selama ini mengenai rendahnya kualitas tenaga kerja di sektor pertanian.

Kesempatan Kerja di Sektor Nonpertanian

Permintaan tenaga kerja di tingkat usahatani bersifat musiman. Pada saat kegiatan pengolahan tanah dan tanam serta panen permintaan tenaga kerja mencapai puncaknya (*peak season*), seringkali pada musim tersebut tenaga kerja setempat tidak mencukupi untuk melakukan kegiatan tersebut, sehingga mendorong datangnya buruh migran dari luar desa. Tetapi sebaliknya pada saat tidak ada kegiatan (*off season*) terutama pada saat pemupukan dan penyiangan, permintaan tenaga kerja sangat rendah, sehingga banyak

tenaga kerja setempat yang menganggur. Keadaan tersebut mendorong munculnya kegiatan migrasi ke kota yang bersifat sirkulasi maupun komutasi. Dengan pemikiran tersebut terlihat ada kaitan antara kesempatan kerja di sektor pertanian dengan kegiatan migrasi untuk memperoleh kesempatan kerja di sektor nonpertanian.

Hasil kajian Irawan dkk. (1988) dan Nurmanaf (1989) menunjukkan bahwa pembangunan irigasi selain meningkatkan kesempatan kerja di tingkat usahatani melalui peningkatan intensitas tanam, juga menciptakan kesempatan kerja di sektor nonpertanian seperti perdagangan, industri rumah tangga dan buruh nonpertanian sebagai dampak dari peningkatan produksi pertanian itu sendiri. Dengan demikian pengembangan produktivitas padi melalui pembangunan irigasi dapat membantu menciptakan kesempatan kerja di sektor nonpertanian. Dengan kata lain hasil penelitian Irawan mendukung pendapat bahwa produktivitas di sektor pertanian merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terciptanya kesempatan kerja di sektor nonpertanian dan jenis kegiatan yang tercipta merupakan kegiatan sepanjang alur vertikal sistem agribisnis komoditas yang bersangkutan. Temuan Irawan dan Nurmanaf ini memberikan implikasi perlunya penekanan pembangunan pertanian melalui pengembangan sistem agribisnis.

Selain faktor produktivitas usaha tani yang mempengaruhi terciptanya kesempatan kerja di sektor nonpertanian, perkembangan industri di sekitar wilayah pertanian akan banyak menciptakan kesempatan kerja nonpertanian bagi sebagian besar petani di lokasi tersebut. Hasil kajian Saptana dkk. (1996) menunjukkan bahwa di Desa Terongkulon yang dekat dengan wilayah industri, curahan tenaga kerja rumah tangga untuk buruh industri mencapai 37,14 persen di atas curahan tenaga kerja untuk sektor pertanian yang hanya sebesar 21,63 persen. Temuan Saptana dkk. (1996) tersebut berbeda dengan temuan Irawan dan Nurmanaf, di mana kesempatan kerja yang tercipta di sektor nonpertanian tidak berkaitan dengan sektor pertanian.

Berdasarkan temuan ketiga peneliti di atas, maka dapat disusun dua strategi pembangunan industrialisasi yaitu : (a) industrialisasi yang berbasis sektor pertanian dan (b) industrialisasi yang tidak berbasis pada sektor pertanian. Di masa krisis ekonomi yang terjadi akhir-akhir ini di mana industri yang tidak berbasis pada sektor pertanian banyak mengalami kebangkrutan, maka dengan sendirinya kesempatan kerja di sektor nonpertanian menjadi hilang, maka pendapatan petani di

sekitar wilayah industri tersebut mengalami penurunan. Hal yang sebaliknya pada strategi yang kedua di mana kesempatan kerja nonpertanian tetap terjamin karena kegiatan di sektor pertanian yang berkait dengan sektor nonpertanian tersebut tetap berjalan. Belajar dari kejadian dalam krisis ekonomi sekarang ini, maka sudah saatnya strategi industrialisasi nasional harus berbasis pada sektor pertanian agar sebagian besar penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dapat terjamin kesempatan kerjanya.

Hasil analisis kuantitatif yang dilakukan oleh Irawan dkk. (1988), Kasryno (1988) dan Nurmanaf (1989) menunjukkan bahwa curahan tenaga kerja rumah tangga pada kegiatan berburuh tani dipengaruhi secara nyata oleh luas kepemilikan lahan dimana makin sempit kepemilikan lahan, maka makin tinggi curahan tenaga kerja pada kegiatan berburuh tani. Lebih lanjut Irawan dkk. (1988) menunjukkan bahwa curahan tenaga kerja rumah tangga pada kegiatan usaha nonpertanian juga dipengaruhi secara negatif oleh kepemilikan lahan. Apabila temuan tersebut dikaitkan dengan hasil penelitian Syafa'at dkk. (1997) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi di mana rasio luas lahan terhadap angkatan kerja rumah tangga makin besar cenderung meningkatkan peluang rumah tangga melakukan migrasi, maka suatu hal yang logis apabila petani berlahan sempit lebih banyak memilih perkerjaan berburuh tani dibanding migrasi karena mereka tidak mempunyai modal untuk melakukan migrasi. Selanjutnya Irawan dkk (1988) dan Nurmanaf (1989) menyatakan bahwa, curahan tenaga kerja pada kegiatan usaha nonpertanian dipengaruhi secara positif oleh kepemilikan lahan. Hal ini sesuai dengan Teori Kipas yang menyatakan bahwa petani berlahan luas mempunyai peluang yang besar dalam melakukan usaha di sektor nonpertanian.

Salah satu hal penting yang dapat ditarik dari temuan-temuan di atas adalah bahwa upaya untuk meningkatkan pendapatan petani berlahan sempit dan buruh tani akan menghadapi persoalan yang bersifat struktural yang terkait dengan sumber daya yang mereka kuasai (*resources endowment*). Oleh karena itu, untuk meningkatkan pendapatan petani dan buruh tani diperlukan upaya perubahan struktural. Perubahan struktural tersebut dapat dilakukan dengan menciptakan kesempatan kerja nonpertanian sepanjang alur agribisnis karena dengan hal itu kesempatan kerja bagi mereka terjamin setiap saat. Inilah fakta yang mendukung perlunya pengembangan sistem agribisnis.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKSANAAN

Ada dua perubahan mendasar yang dialami Indonesia yang akan mewarnai perspektif ketenagakerjaan dan kesempatan kerja di sektor pertanian yang akan datang yaitu: (a) krisis ekonomi dan politik yang terjadi saat ini, dan (b) globalisasi perdagangan internasional. Krisis ekonomi dan politik telah melumpuhkan kemampuan sendi-sendi ekonomi dalam membangun industrialisasi di Indonesia. Perencanaan industrialisasi yang direncanakan secara berencana melalui perencanaan jangka pendek dengan tahapan Repelita dan Pembangunan Jangka Panjang memerlukan pengkajian ulang terutama tahapan dan sasarannya karena keterbatasan kemampuan sumber dana baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta. Dalam perencanaan PJP tahap I diasumsikan sektor pertanian sudah mampu menyediakan kebutuhan pangan dalam negeri dan mendukung proses industrialisasi, sehingga perencanaan dalam PJP II diarahkan untuk meningkatkan daya saing sektor industri dalam menghadapi globalisasi perdagangan.

Dengan terjadinya krisis ekonomi dan politik saat ini yang disebabkan oleh meningkatnya nilai tukar dollar terhadap rupiah terlihat bahwa sesungguhnya kemampuan sektor pertanian dalam menyediakan kebutuhan pangan tidak seperti yang diasumsikan sebelumnya. Begitu juga dengan kemampuan sektor pertanian dalam mendukung terlaksananya industrialisasi di Indonesia. Banyak industri tidak dapat berproduksi karena kekurangan bahan baku yang berasal dari luar negeri dan tidak sedikit industri pengolahan pertanian juga bangkrut seperti ternak ayam karena sumber pakannya berasal dari luar negeri. Bahan baku industri tahu tempe terpaksa disubsidi. Melihat keadaan seperti itu, para pakar menyarankan perlunya melakukan reorientasi strategi pembangunan industrialisasi di Indonesia dengan lebih menekankan kembali pada pembangunan pertanian. Nampaknya juga terlihat adanya keinginan dari para pengambil kebijakan untuk melakukan reorientasi tersebut. Dengan demikian diperkirakan setelah masa krisis berakhir, strategi pembangunan nasional akan diarahkan pada pembangunan pertanian.

Perkiraan akan adanya perubahan strategi pembangunan industrialisasi yang akan lebih menekankan pada pembangunan pertanian memberikan implikasi bahwa sektor pertanian akan menjadi sumber pertumbuhan utama ekonomi nasional. Seperti

diketahui, sumber pertumbuhan sektor pertanian berasal dari permintaan produk sektor yang bersangkutan baik yang berasal dari pasar domestik maupun pasar dunia. Dengan makin meningkatnya arus perdagangan dunia maka persaingan produk pertanian akan makin meningkat di kedua pasar tersebut. Untuk menghadapi ketatnya persaingan komoditas pertanian di pasar domestik maupun dunia, maka perlu dilakukan upaya meningkatkan daya saing produk pertanian. Peningkatan daya saing hanya dapat dilakukan melalui efisiensi, spesialisasi dan standardisasi. Dengan demikian perspektif ketenagakerjaan Indonesia di masa datang dicirikan oleh tuntutan efisiensi, spesialisasi dan standardisasi. Spesialisasi dan standardisasi membutuhkan tenaga kerja yang terampil tetapi tidak selalu yang berpendidikan tinggi. Oleh karena itu perspektif ketenagakerjaan pertanian yang dibutuhkan di masa yang akan datang adalah tenaga muda yang penuh dengan keterampilan. Hasil penelitian Patanas menunjukkan bahwa tenaga kerja pertanian saat ini didominasi oleh kaum muda dalam usia produktif namun dengan tingkat pendidikan yang masih rendah yaitu sekolah dasar. Dengan perspektif ketenagakerjaan pertanian yang demikian, maka sesungguhnya kualitas tenaga kerja pertanian yang ada saat ini sudah dapat mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja ke depan melalui pengembangan keterampilan mereka. Rendahnya tingkat pendidikan tidak perlu dkuatirkan karena dalam perspektif ketenagakerjaan yang akan datang yang dibutuhkan adalah ketrampilan dan kekuatan fisik bukan pada pemikiran.

Isu yang mengemuka berkaitan dengan pembangunan sektor pertanian saat ini adalah rendahnya nilai tambah yang diterima petani yang disebabkan oleh kurang berkembangnya industri hilir yang berkait dengan sektor produksi dan juga disebabkan oleh sempitnya penguasaan lahan petani, sehingga selain pendapatan petani rendah, kesempatan kerja di tingkat usahatani juga rendah sementara kesempatan kerja di luar pertanian sepanjang alur vertikalnya juga tidak ada. Hasil penelitian Patanas menunjukkan bahwa kesempatan kerja baik pertanian maupun nonpertanian di wilayah pedesaan dapat diciptakan melalui peningkatan produktivitas usaha tani dan industrialisasi di sekitar wilayah pedesaan.

Berdasarkan karakteristik wilayah, maka faktor terciptanya kesempatan kerja di pedesaan Jawa akan berbeda dengan di pedesaan luar Jawa. Di pedesaan Jawa, lahan yang dikuasai petani sangat sempit, sehingga kesempatan kerja di tingkat usaha tani juga

rendah. Andalan utama kesempatan kerja di wilayah pedesaan Jawa adalah kesempatan kerja nonpertanian yang berbasis pada industri nonpertanian. Dengan kemampuan yang dimiliki wilayah Jawa dalam *industrialization learning* dan didukung dengan infrastruktur yang lengkap, maka dalam jangka panjang peluang untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi para petani sempit dan buruh tani di wilayah Jawa berasal dari sektor industri nonpertanian. Dengan kata lain strategi industrialisasi di Jawa berbasis pada sektor nonpertanian.

Hal yang sebaliknya dengan wilayah pedesaan luar Jawa. Dengan penguasaan lahan yang cukup luas maka andalan kesempatan kerja di luar Jawa adalah kesempatan kerja pertanian dan nonpertanian yang berbasis pada sektor pertanian. Peningkatan produktivitas pertanian dalam kerangka pengembangan sistem agribisnis di wilayah luar Jawa amat penting dalam rangka menciptakan kesempatan kerja di tingkat usahatani dan di sepanjang alur vertikal sistem agribisnisnya. Dengan demikian, dalam jangka panjang kesempatan kerja bagi penduduk di wilayah pedesaan di luar Jawa adalah berasal dari industrialisasi yang berbasis pada sektor pertanian terutama subsektor perkebunan. Kekurangan tenaga kerja di luar Jawa dapat dipenuhi dengan program transmigrasi, sehingga program ini, selain dapat menutupi kekurangan tenaga kerja di luar Jawa juga dapat mengurangi beban penyerapan tenaga kerja di Jawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, J. dan Anne Booth. 1994. Pertumbuhan Sektor Jasa: *dalam* Anne Booth (Ed). Ledakan Harga Minyak dan Dampaknya. UI Press, Jakarta.
- Anwar, M.A. 1992. Transformasi Struktur Ketenagakerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, 1980-1990: *dalam* M. Arsjad Anwar, Thee Kian We, Iwan S.A. (Ed). Pemikiran, Pelaksanaan dan Perintisan Pembangunan Ekonomi. Kerja sama FE-UI, ISEI dengan PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Booth, A. dan Peter Mc Cowley. 1982. Perekonomian Indonesia Sejak Pertengahan Tahun Enampuluhan: *dalam* Anne Booth dan Peter Mc Cowley (Ed). Ekonomi Orde Baru. LP3ES, Jakarta.
- Booth, Anne. 1994. Pertumbuhan dan Transformasi Struktural Dalam Orde Baru: *dalam* Anne Booth (Ed). Ledakan Harga Minyak dan Dampaknya. UI Press, Jakarta.
- ESCAP. 1982. Industrialization Trends in The Developing ESCAP Region. Economic Bulletin of Asia Pacific 33(2) p.52-92.
- Handewi, P.S. 1988. Analisis Usahatani Padi Sawah di Jawa Barat: *dalam* Kasryno, F. *et al.* (Ed). 1988. Perubahan Ekonomi Pedesaan. Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Bogor.
- Hendiarto. 1989. Keragaan Teknologi dan Pendapatan Usahatani Padi pada Berbagai Type Lahan di Lampung: *dalam* Pasandaran, E. *et al.* (Ed). 1989. Perkembangan Struktur Produksi, Ketenaga-kerjaan dan Pendapatan Rumah Tangga Pedesaan. Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Bogor.
- Hermanto, dan A. Purwoto. 1985. Pola Kesempatan Kerja dan Sumber Pendapatan di Jawa Timur. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Bogor.
- Irawan, B., A. Djauhari dan A. Suryana. 1988. Penyerapan Tenaga Kerja di Daerah Produksi Padi Jawa Barat: *dalam* Kasryno, F. *et al.* (Ed). 1988. Perubahan Ekonomi Pedesaan. Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Bogor.
- Kasryno, F. 1988. Pola Penyerapan Tenaga Kerja Pedesaan di Indonesia. *dalam* Kasryno, F. *et al.* (Ed). 1988. Perubahan Ekonomi Pedesaan. Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Bogor.
- Mintoro, A. dan Suhartini. 1996. Dinamika Kesempatan Kerja dan Pendapatan Pedesaan Kalsel. Laporan Penelitian Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Marisa, Y. dan B. Hutabarat. 1988. Analisis Usahatani Padi di Sulawesi Selatan. *dalam* Kasryno, F. *et al.* (Ed). 1988. Perubahan Ekonomi Pedesaan. Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Bogor.
- Nurmanaf, R. 1989. Alokasi Curahan Tenaga Kerja Rumah Tangga Pedesaan di Lampung: *dalam* Pasandaran, E. *et al.*, (Ed). 1989. Perkembangan Struktur Produksi, Ketenagakerjaan dan Pendapatan Rumah Tangga. Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Bogor.

- Rasahan, C.H. 1996. Perspektif Strategi Ketenagakerjaan Pertanian dalam Rangka Meningkatkan Produktivitas Pertanian. Paper dibawakan dalam Seminar Peningkatan Produktivitas, 6 - 7 Agustus 1996. Jakarta.
- Saptana, M. Syukur dan Erwidodo. 1996. Studi Dinamika Kesempatan Kerja dan Pendapatan di Pedesaan Jawa Timur. Laporan Penelitian Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Santoso, B. dan T. Sudaryanto. 1989. Pengaruh Lingkungan Produksi dan Karakterisasi Demografi Terhadap Pola Curahan Tenaga Kerja Rumah Tangga Pedesaan di Kalimantan Selatan: *dalam* Pasandaran, E., *et al.* (Ed). Perkembangan Struktur Produksi, Ketenagakerjaan dan Pendapatan Rumah Tangga Pedesaan. Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Bogor.
- Saleh, C. 1984. Pola Kesempatan Kerja dan Sumber Pendapatan di Sulawesi Selatan. Laporan Hasil Penelitian Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Bogor.
- Saleh, C. dan Hendiarto. 1985. Pola Kesempatan Kerja dan Sumber Pendapatan di Sulawesi Selatan. Laporan Hasil Penelitian Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Bogor.
- Saleh, C. dan A.K. Zakaria. 1997. Studi Dinamika Kesempatan Kerja dan Pendapatan di Pedesaan Sulawesi Selatan. Laporan Hasil Penelitian Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Bogor.
- Simatupang, P. dan Sudi Mardianto. 1996. Pengaruh Kebijakan Moneter dan Kurs Valuta Asing Terhadap Transformasi Struktur Perekonomian Indonesia, Prosiding Seminar Nasional PERHEPI Pertanian dan Pedesaan Indonesia Dalam Transisi : Refleksi dan Prospektif. PERHEPI, Jakarta.
- Simatupang, P, Hendiarto, Supriyati, Reni Kustiari, Adang Agustian, Sudi Mardianto, Ening Ariningsih. 1996. Pengaruh Perubahan Teknologi Terhadap Peranan Sektor Pertanian Dalam Struktur Perekonomian Indonesia. Laporan Teknis Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Sjahrir. 1992. Dinamika Ekonomi Indonesia 1990-1992. Warta Ekonomi, Jakarta.
- Soentoro, Saptana, Soemaryanto, Muchjidin Rachmat dan Mat Syukur. (1998). Dinamika Penguasaan Lahan, Kesempatan Kerja dan Pendapatan Rumah Tangga. Analisis Panel Petani Nasional (Patanas) dengan Pendekatan Ekoregional. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Sumaryanto dan S. Pasaribu. 1996. Dinamika Kesempatan Kerja dan Pendapatan di Pedesaan Lampung. Laporan Hasil Penelitian Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Suryana, A. 1989. Perspektif Mobilitas Kerja dan Kesempatan Kerja Pedesaan: *dalam* Prosiding Patanas Perkembangan Struktur Produksi, Ketenagakerjaan dan Pendapatan Rumah Tangga Pedesaan. Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Bogor.
- Syafa'at, N., B. Sayaka, S. Utari, S. M. Mardiharini, Soemaryanto, I Wayan Sudana, A. S. Bagyo, C. Saleh, Saptana, R. Kustiari, S. M. Pasaribu. 1998. Studi Dinamika Kesempatan Kerja dan Pendapatan Pedesaan (PATANAS) : Mobilitas Tenaga Kerja Pedesaan. Laporan Teknis Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.